

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. SIMPULAN

1. Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Desa Mekarsari Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, mengacu pada Peraturan Bupati No.188.45/Kep.731-DP2KBP3A/2017, bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta wanita dalam pembangunan menuju keluarga sehat dan sejahtera, pemerintah desa harus menjamin terlaksananya kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan dan terpadu.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Desa Mekarsari, menunjukkan bahwa program tersebut masih belum optimal. Berdasarkan teori Implementasi program/kebijakan publik dikemukakan oleh Edwards III yang peneliti gunakan, yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/Sikap dan Struktur Birokrasi.

- a. Pada konteks Komunikasi, masih sangat dirasa kurang saat sosialisasi pelaksanaan program kepada sasaran dan kurangnya keikutsertaan masyarakat menjalankan program P2WKSS.

- b. Pada konteks Sumberdaya, berdasarkan temuan dalam penelitian diketahui bahwa rendahnya kualitas sumberdaya manusia merupakan salah satu hambatan bagi pelaksanaan kebijakan yang berimplikasi pada kinerja yang dihasilkan oleh Desa Mekarsari.
 - c. Pada konteks Disposisi, sangat menentukan terhadap perwujudan kinerja yang optimal dari program P2WKSS. Kesulitan untuk memberikan insentif material yang memadai merupakan fenomena yang dijumpai di lapangan, namun kiranya masih banyak yang perlu disempurnakan oleh kepala Desa Mekarsari, khususnya ketersediaan SDM yang memadai sesuai kebutuhan baik yang bersifat positif berupa pemenuhan kepentingan pribadi (*Self Interest*).
 - d. Pada konteks Struktur Birokrasi, terlihat dari tidak adanya kerjasama dari berbagai pihak yang seharusnya terlibat dalam Program P2WKSS ini, seperti dinas-dinas terkait program P2WKSS sehingga menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.
2. Dalam Implementasi Kebijakan Program P2WKSS terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam optimalisasi program peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera.

5.2 Saran

1. Saran Akademis

Setiap melaksanakan Implementasi Kebijakan Program Pemerintah Daerah harus mengacu pada Undang-Undang atau Perda yang berlaku, agar program tersebut berjalan atau terlaksana secara optimal. Tentang Implementasi

Kebijakan yang mengacu pada teori Edwars III, keempat poin yang disebutkan pada teori tersebut harus menjadi tolok ukur agar Program P2WKSS di Desa Mekarsari optimal. Sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur dan tim P2WKSS harus dilakukan dengan semaksimal mungkin, agar warga desa pun memahami dan mampu berkontribusi agar program tersebut dalam berjalan optimal.

2. Saran Praktis

Setelah melakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Desa Mekarsari Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, peneliti mengajukan beberapa saran kepada Pemerintah Desa Mekarsari untuk lebih meningkatkan kemampuan untuk bertindak sebagai inisiator dalam mengkomunikasikan program P2WKSS kepada masyarakat sehingga implementasinya lebih optimal, terutama melalui sosialisasi implementasi kebijakan program P2WKSS, lebih mengembangkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, melalui proses dialog, yaitu persiapan kerjasama, penentuan arah kebijakan secara bersama-sama masyarakat, dan pembentukan kemitraan, pertemuan bersama dalam rangka pemecahan masalah dan lebih aktif memberdayakan masyarakat agar menjadi manusia yang mandiri, sebaiknya Pemerintah Desa Mekarsari berusaha bersikap lebih optimis, responsif, dan bersikap lebih loyal antar pegawai serta aparatur Desa Mekarsari dan Tim P2WKSS harus lebih kreatif dan inovatif agar masyarakat tertarik dan ikut serta pada Program P2WKSS khususnya wanita.